

NILAI-NILAI MULTIKULTURAL: PERSPEKTIF FALSAFAH PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Slamet

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas IVET Semarang-Jawa Tengah
E-Mail: slametikipvetsmg@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis: 1) urgensi pendidikan multikultur dalam negara-bangsa yang plural; 2) kebijakan implementasi multikulturalisme dalam institusi pendidikan; dan 3) nilai-nilai multikultural sebagai penjabaran dari falsafah Pancasila sebagai dasar negara. Jenis penelitian didesain menggunakan penelitian deskriptif, sedangkan bentuk penelitian digunakan analisis isi (*content analysis*), sehingga pelaksanaannya mengacu pada prosedur analisis isi. Hasil kajian dapat disimpulkan bahwa penanaman nilai-nilai multikultural dalam institusi pendidikan dapat “ditiptkan” pada mata pelajaran Sejarah, PPKn, dan Agama, selain melalui kegiatan ekstrakurikuler. Pendidikan multikultural perlu terus dilakukan pendalamannya secara komprehensif, sehingga tidak stagnan hanya terbatas pada sebuah wacana tetapi dapat diimplementasikan ke dalam institusi pendidikan.

Keyword: Nilai-nilai multikultural, Pancasila dasar negara.

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat, khususnya yang kerap terjadi di negara-bangsa Indonesia yang secara realitas plural. Dengan lain kata lain, pendidikan multikultural dapat menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial budaya. Spektrum kultur masyarakat Indonesia yang amat beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan guna “mengolah” perbedaan tersebut menjadi suatu aset, bukan sumber perpecahan. Saat ini, pendidikan multikultural mempunyai dua tanggung jawab besar, yaitu: menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar, dan ‘menyatukan’ bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya, suku/etnis, bahasa, agama, kewilayahan, dan sebagainya.

Pendidikan kebangsaan dan ideologi telah banyak diberikan di Perguruan Tinggi (PT), namun pendidikan multikultural belum diberikan dengan proporsi yang tepat. Oleh karenanya, sekolah dan perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dapat mengembangkan pendidikan multikultural dengan model masing-masing sesuai azas otonomi pendidikan atau sekolah. Menurut hemat penulis, pendidikan multikultural sebaiknya lebih ditekankan pada mata pelajaran kebangsaan dan moral, seperti halnya mata pelajaran: Sejarah, PKN, dan Agama.

Pada dasarnya model-model pembelajaran sebelumnya yang terkait dengan kebangsaan telah ada. Namun masih kurang memadai sebagai sarana pendidikan guna menghargai perbedaan masing-masing: suku/ etnis, budaya, agama, bahasa, dan keberagaman lainnya. Hal itu terlihat dengan munculnya konflik yang kerap terjadi pada realitas kehidupan berbangsa dan bernegara, hal bukti bahwa pemahaman toleransi masih sangat kurang. Hingga saat ini, jumlah peserta didik dan mahasiswa yang memahami sesuatu yang sebenarnya ada di balik budaya suatu bangsa masih sangat sedikit. Menurut Drajat,dkk. (2011); masyarakat justru mengetahui lebih dalam mengenai *stereotip* suatu suku bangsa dibandingkan mengenal sesuatu yang sebenarnya dimiliki suku itu. Padahal, dalam konteks diskursus pendidikan multikultural, memahami makna dibalik realitas budaya suatu suku bangsa, itu merupakan hal yang esensial. Oleh karenanya, penyelenggaraan pendidikan multikultural dapat dikatakan berhasil bila terbentuk pada diri peserta didik dan mahasiswa sikap hidup saling toleran, tidak bermusuhan dan tidak berkonflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku/ras, bahasa, adat istiadat agama, dan yang lainnya. Hal itu senada yang disampaikan Stephen Hill, Direktur Perwakilan Badan PBB Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya, UNESCO untuk kawasan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Timor Leste; bahwa pendidikan multikultural dapat dikatakan berhasil bila prosesnya

melibatkan semua elemen masyarakat. Secara konkrit, pendidikan ini tidak hanya melibatkan guru atau pemerintah saja, namun seluruh elemen masyarakat. Hal itu dikarenakan adanya multidimensi aspek kehidupan yang tercakup dalam pendidikan multikultural.

Perubahan yang diharapkan dalam konteks pendidikan multikultural ini tidak terletak pada justifikasi angka atau statistik dan berorientasi kognitif *ansich* sebagaimana lazimnya penilaian keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan di negeri ini. Namun lebih dari itu, pada terciptanya kondisi yang nyaman, damai, toleran, dalam kehidupan bermasyarakat, dan tidak selalu muncul konflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan SARA. Bahkan ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa hasil dari pendidikan multikultural tidak dapat ditentukan dengan standar waktu tertentu. Oleh sebab itu dalam konteks dunia pendidikan Indonesia sudah saatnya memberikan perhatian besar terhadap pendidikan multikultural. Secara tidak langsung, hal itu dapat memberikan solusi bagi sejumlah permasalahan sosial yang dihadapi negara-bangsa Indonesia ke depan.

Terkait dengan multikultural pada pembelajaran sejarah, sebenarnya nilai-nilai multikultural tersebut telah dimiliki oleh leluhur dan nenek moyang kita. Bahkan nilai-nilai multikultural itu jauh sebelum bangsa Indonesia mengenal tulisan yang dikenal dari mata pelajaran sejarah sebagai pra-aksara. Sistem kegotongroyongan, sosial kemasya-rakatan, sistem kepercayaan, budaya, dan sebagainya merupakan contoh nyata nilai-nilai multikultural yang telah dimiliki oleh leluhur. Nilai-nilai multikultural tersebut menjadi dasar pada perkembangan dan periodisasi atau pembabakan sejarah berikutnya, maka periodisasi sebelumnya menjadi dasar dan tak terpisahkan dengan nilai-nilai multikultural selanjutnya, begitu seterusnya, sehingga nilai-nilai multikultural tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Nilai-nilai multikultural yang lalu masih digunakan dan terus hidup pada periodisasi berikutnya, begitu pula dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup serta dasar negara Indonesia (Slamet, 2017). Atas dasar pemikiran di atas, maka tujuan dari kajian ini terkait dengan: 1) urgensi pendidikan multi-kultur dalam negara-bangsa yang plural; 2) kebijakan implementasi multikulturalisme dalam institusi pendidikan; dan 3) nilai-nilai multikultural dalam negara yang berdasar Pancasila.

II. KAJIAN LITERATUR

Banks (1993) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color*, yang ingin mengeksplor perbedaan sebagai keniscayaan dari anugerah Tuhan. Multikulturalisme adalah paham tentang kultur (budaya) yang beragam, dalam keberagaman kultur itu keniscayaan adanya pemahaman, saling pengertian, toleransi, dan sebagainya, agar tercipta suatu kehidupan damai dan sejahtera serta terhindar dari konflik yang berkepanjangan (Naim & Sauqi, 2011). Anderen & Cuher (dalam Parekh, 2012) mengemukakan bahwa pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keberagaman kebudayaan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dikemukakan bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah pendidikan tentang keberagaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat yang serba plural, seperti halnya negara-bangsa Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup pendidikan sebagai ruang transformasi ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) hendaknya mampu memberikan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara saling menghargai dan menghormati atas realita yang beragam (*plural*) dari latar belakang dan sosial budaya yang melingkupinya.

Konsep pendidikan multikultur di negara-negara yang menganut paham demokrasi seperti Kanada dan Amerika Serikat, bukan merupakan sesuatu hal yang baru lagi. Kedua negara itu berusaha melenyapkan deskriminasi rasial antara orang kulit putih dan kulit hitam. Tujuan utamanya adalah memajukan dan memelihara integritas nasional di negaranya (Suparlan, 2002). Amerika Serikat ketika ingin membentuk masyarakat pasca kemerdekaan (4 Juli 1776) baru disadari bahwa masyarakatnya terdiri dari berbagai ras dan asal negara yang berbeda. Oleh karenanya Amerika mencoba mencari terobosan baru, yaitu dengan menempuh strategi menjadikan sekolah sebagai pusat sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai baru yang dicita-citakan. Melalui pendekatan inilah, dari SD sampai Perguruan Tinggi Amerika Serikat berhasil membentuk bangsanya yang dalam perkembangan melampaui masyarakat induknya yaitu Eropa. Kaitannya dengan nilai-nilai kebudayaan yang perlu diwariskan dan dikembangkan melalui sistem pendidikan pada suatu masyarakat, Amerika Serikat menggunakan sistem demokrasi dalam pendidikan yang dipelopori oleh John Dewey. Intinya adalah toleransi tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan

bersama, tetapi juga menghargai kepercayaan dan berinteraksi dengan anggota masyarakat (Tilaar, 2002).

Tahun 1980-an dianggap sebagai kemunculan lembaga sekolah yang berlandaskan pendidikan multikultur yang didirikan oleh para peneliti dan aktivis pendidikan progresif. James Bank adalah salah seorang pioner dari pendidikan multikultur. Bank yang membumikan konsep pendidikan multikultur menjadi ide persamaan pendidikan. Pada pertengahan dan akhir 1980-an, muncul kelompok sarjana, diantaranya: Carl Grant, Christine Sleeter, Geneva Gay, dan Sonia Nieto yang memberikan wawasan lebih luas soal pendidikan multikultur, memperdalam kerangka kerja yang membumikan ide persamaan pendidikan dan menghubungkannya dengan transformasi dan perubahan sosial (Stavenhagen, 1996). Didorong tuntutan warga Amerika keturunan Afrika Latin/Hispanic, warga pribumi dan kelompok marjinal lain terhadap persamaan kesempatan pendidikan serta didorong oleh usaha komunitas pendidikan profesional untuk memberikan solusi terhadap masalah pertentangan ras dan rendahnya prestasi kaum minoritas di sekolah, menjadikan pendidikan multikultur sebagai slogan yang sangat populer pada tahun 1990-an, bahkan selama dua dekade konsep pendidikan multikultur menjadi slogan yang sangat populer di sekolah-sekolah Amerika Serikat. Secara umum, konsep ini diterima sebagai strategi penting dalam pengembangan toleransi dan sensitivitas terhadap sejarah dan budaya dari kelompok etnis yang beraneka ragam.

Ide pendidikan multikultural akhirnya menjadi komitmen global seperti direkomendasi UNESCO pada Oktober 1994 di Jenewa. Rekomendasi itu diantaranya memuat 4 (empat) pesan. Pertama, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinnekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat, dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerjasama dengan orang lain. Kedua, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. Ketiga, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya juga meningkatkan pengembangan kedamaian dalam diri pikiran peserta didik, sehingga peserta didik

mampu membangun secara lebih kokoh, berkualitas, toleransi, kesabaran, dan kemauan untuk berbagi serta mampu memelihara kerja sama dengan teman lain.

Konsep pendidikan multikultur dalam perjalanannya menyebar luas ke kawasan di luar Amerika Serikat, khususnya di negara-negara yang memiliki keragaman etnis, ras, agama dan budaya seperti Indonesia. Sekarang ini, pendidikan multikultur secara umum mencakup ide pluralisme budaya. Tema umum yang dibahas meliputi pemahaman budaya, penghargaan budaya dari kelompok yang beragam dan persiapan untuk hidup dalam masyarakat pluralistik (Kuper & Kuper, 2000). Hasil penelitian Slamet, dkk. (2017) memberikan gambaran bahwa wacana pendidikan multikulturalisme di Indonesia menemukan momentumnya ketika sistem nasional yang otoriter militeristik tumbang seiring dengan jatuhnya rezim Soeharto. Saat itu keadaan negara menjadi kacau-balau dengan berbagai konflik antar suku bangsa dan antar golongan, yang menimbulkan keterkejutan dan kengerian pada anggota masyarakat. Kondisi demikian membuat berbagai pihak semakin mempertanyakan kembali sistem nasional yang cocok bagi Indonesia yang sedang berubah, dan suatu sistem yang dapat membuat masyarakat Indonesia hidup damai dengan meminimalisir potensi konflik.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian didesain menggunakan penelitian deskriptif, sedangkan bentuk penelitian digunakan analisis isi (*content analysis*), maka pelaksanaannya mengacu pada prosedur analisis isi (Creswell, 2009). Oleh karena itu peneliti mengembangkan dua langkah atau prosedur, yaitu: 1) pengadaan data meliputi (1) penentuan unit analisis melalui pembacaan secara cermat dan berulang, (2) perekaman dan/atau pencatatan data menjadi masalah pokok karena analisis konten berupa data simbolik yang tidak terstruktur; 2) validasi data yaitu menggunakan pola validasi semantik untuk mengukur tingkat kesensitifan makna simbolik yang terkait dengan konteks; dan 3) proses inferensi dan analisis sebagai salah satu prosedur analisis konten. Inferensi ini dimaksudkan untuk menarik simpulan yang bersifat abstrak, untuk kemudian dilakukan penyajian dan pembahasan data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Urgensi Pendidikan Multikultur dalam Negara-Bangsa yang Plural

Sejak kemunculannya sebagai disiplin ilmu pada dekade 1960-an dan 1970-an, pendidikan berbasis *multicultural* (*Multicultural Based Education* = MBE) telah didefinisikan dalam banyak cara dari berbagai perspektif. Dalam terminologi ilmu pendidikan dikenal peristilahan yang hampir sama dengan MBE, yaitu pendidikan multikultural (*multicultural education*) seperti yang digunakan dalam konteks kehidupan multikultural negara-negara Barat. Sejumlah definisi terikat dalam disiplin ilmu tertentu, seperti: pendidikan antropologi, sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya. Hernandez (dalam Sunarto, 2004) mengemukakan definisi klasik untuk menekankan dimensi konseptual MBE yang penting bagi pendidik. Definisi pertama; menekankan esensi MBE sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami individu dalam pertemuan manusia kompleks dan beragam (*plural*) secara kultur. Definisi itu bermaksud merefleksikan pentingnya budaya, ras, gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, kewilayahan, dan pengecua-lian dalam proses pendidikan. Dalam konseptualisasinya, MBE adalah sebuah kegiatan pendidikan yang bersifat *empowering*. Oleh karenanya MBE adalah sebuah visi tentang pendidikan yang selayaknya dan seharusnya dapat diterapkan dan dipahami semua peserta didik.

Terkait dengan peserta didik, MBE menyoalkan tentang etnisitas, gender, kelas, bahasa, agama, dan perkecua-lian yang mempengaruhi, membentuk, dan mempola tiap-tiap individu sebagai makhluk budaya. MBE adalah hasil perkembangan seutuhnya dari konstelasi atau interaksi unik masing-masing individu yang memiliki kecerdasan, kemampuan, dan bakat. MBE mempersiapkan anak didik bagi kewarganegaraan dalam komunitas budaya dan bahasa yang majemuk dan saling terkait. MBE juga berkenaan perubahan pendidikan yang signifikan. MBE menggambarkan realitas budaya, politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks, yang secara luas dan sistematis mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi di dalam sekolah dan luar ruangan. MBE juga menyangkut seluruh aset pendidikan yang termanifestasikan melalui konteks, proses, dan muatan (*content*). MBE menegaskan dan memperluas kembali praktik yang patut dicontoh, dan berupaya memperbaiki berbagai kesempatan pendidikan optimal yang tertolak. Ia memperbincangkan seputar penciptaan lembaga pendidikan yang menyediakan

lingkungan pembelajaran yang dinamis, yang mencerminkan cita-cita persamaan, kesetaraan, dan keunggulan. Paparan di atas menggambarkan epistemologi pendidikan multikultural dan konsep pendidikan multikultural. Konteks pendidikan multikulturalisme di Indonesia perlu dimasukkan ke dalam kurikulum nasional yang pada akhirnya dapat menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang multikultur, serta upaya-upaya lain yang dapat dilakukan guna perwujudan tersebut.

Uraian di atas senada pendapat Supardan (2005) bahwa dalam mewujudkan pendidikan multikultural di Indonesia perlu diperhatikan, karena: 1) berfungsi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik; 2) peserta didik tidak tercerabut dari akar budayanya; dan 3) pendidikan multikultural diterapkan dalam kurikulum nasional dan sangat relevan di alam demokrasi seperti negara-bangsa Indonesia yang plural.

Urgensinya pendidikan multikultur itu dapat dilihat dari berbagai peristiwa yang belum menunjukkan kesadaran dan pemahaman sebagai negara-bangsa yang plural. Berbagai indikator yang memperlihatkan adanya tanda-tanda perpecahan bangsa tersebut seperti konflik di Ambon, Papua, maupun Poso, seperti api dalam sekam sewaktu-waktu bisa meledak, walaupun berkali-kali bisa diredam. Kejadian tersebut bukan saja merenggut korban jiwa, tetapi juga telah menghancurkan ratusan tempat ibadah (masjid dan gereja).

4.2 Kebijakan Implementasi Multikulturalisme dalam Institusi Pendidikan

Beberapa aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan pendidikan multikultur dalam struktur sekolah adalah tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi, termasuk tidak adanya penghinaan terhadap: ras, etnis, budaya, agama, dan gender. Juga harus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, diantaranya mencakup pakaian, musik, makanan kesukaan dan lain sebagainya yang secara struktur memiliki perbedaan. Selain itu, juga memberikan kebebasan bagi anak dalam merayakan hari-hari besar umat beragama serta memperkokoh sikap anak agar merasa utuh terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis (Slamet, 2016).

Memperhatikan uraian di atas, kebijakan yang perlu dilakukan dalam proses pendidikan multikultural adalah: 1) tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan dengan persekolahan atau pendidikan multikultural dengan program sekolah for-

mal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan membebaskan pendidik dari asumsi bahwa tanggung jawab primer mengembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan siswa semata-mata berada di tangan guru dan justru semakin banyak pihak yang bertanggungjawab karena program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah; 2) menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik adalah sama. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. Secara tradisional, para pendidik mengasosiasikan kebudayaan hanya dengan kelompok-kelompok sosial yang relatif *self-sufficient* dari pada dengan sejumlah orang yang secara terus-menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih kegiatan. Dalam konteks pendidikan multikultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program pendidikan multikultural untuk melenyapkan kecenderungan memandang siswa secara stereotip menurut identitas etnik dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar tentang kesamaan dan perbedaan di kalangan siswa dari berbagai kelompok etnik; 3) karena pengembangan kompetensi dalam suatu "kebudayaan baru" biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, bahkan dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya-upaya untuk mendukung sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Mempertahankan dan memperluas solidaritas kelompok adalah menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru. Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan multikultural tidak dapat disamakan secara logis; 4) pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan yang akan diadopsi ditentukan oleh sejarah dan situasi kondisi lingkungan sekitar; dan 5) kemungkinan bahwa pendidikan (dalam dan luar sekolah) meningkatkan kesadaran kompetensi dalam beberapa kebudayaan (Hasan, 2000).

Uraian di atas merespon berbagai masalah yang muncul karena keberagaman latar belakang sosial budaya meliputi ras, suku, agama, status sosial, mata pencaharian, kewilayahan, dan lain-lain. Berbagai masalah yang muncul itulah yang akhirnya menjadi konflik berkepanjangan dan tidak (baca: belum) dapat menemui titik terang sebagai jalan keluar untuk masalah yang menyangkut sosial budaya. Oleh karenanya pendidikan multikultural sebagai usaha sadar untuk pengembangan kepribadian di dalam dan

di luar sekolah bagi peserta didik perlu diperkuat dengan sebuah aturan dari pemangku kebijakan.

4.3 Nilai-nilai Multikultural dalam Negara yang Berdasar Pancasila

Corak kehidupan masyarakat modern menurut perspektif sejarah dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa, maka dalam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara, nilai-nilai multikultural menjadi rujukan penting agar tidak terjadi gesekan kepentingan dalam bermasyarakat. Apalagi negara Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga secara ras/etnis, budaya, bahasa, agama, hingga pada kondisi sosial ekonomi masyarakat/golongan yang berbeda-beda tepat bersatu jika Pancasila dijadikan satu-satunya sumber dan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebab setiap sila dari Pancasila terdapat nilai-nilai multikultural (Slamet, 2017).

1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama terkait dengan soal hubungan antara negara dengan agama serta hubungan antar umat beragama. Nilai-nilai itu antara lain: takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menghormati pada agama/kepercayaan lain, kerukunan dan kerjasama antar umat beragama. Bagi warga negara, nilai-nilai tersebut membawa akibat, antara lain lembaga-lembaga dan komunitas keagamaan serta para pemeluk agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki kewajiban untuk secara proaktif meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kebebasan beribadah bagi pemeluknya, menghormati agama/kepercayaan lain, membina sikap toleransi, kerukunan dan kerja sama antar umat beragama.

2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah terkait soal hubungan antara negara dengan warga negara serta hubungan antara negara dengan bangsa lain. Nilai-nilai ini seperti: persamaan derajat, penghargaan hak asasi manusia, solidaritas antar bangsa, keadilan, keberadaban, dan perdamaian. Bagi warga negara, nilai-nilai tersebut membawa akibat pada warga negara untuk memiliki kewajiban moral dalam pengembangan terhadap hak asasi manusia; pengembangan budaya kesamaderajatan, dan deskriminasi, saling menghormati, kerjasama, solidaritas, perdamaian, dan kerja sama dengan

sesama warga negara serta dengan negara lain; serta pengembangan sikap dan perilaku yang adil dan beradab.

3) Sila Persatuan Indonesia

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga terkait soal keberlangsungan tanah air dan bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini antara lain: cinta bangsa, cinta tanah air, persatuan bangsa, penghargaan terhadap kemajemukan, keselarasan dalam kemajemukan, dan gotong-royong. Bagi warga negara, nilai-nilai tersebut membawa akibat sebagai warga negara memiliki kewajiban moral untuk mengembangkan sikap nasionalisme dan patriotisme; menghargai kemajemukan dan mengembangkannya kerja sama lintas suku ras, agama, dan golongan; mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok demi terpeliharanya kesatuan bangsa.

4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat terkait pengelolaan pemerintahan negara. Nilai-nilai itu seperti: kebijaksanaan, musyawarah, mufakat, demokrasi, partisipasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas. Bagi warga negara, nilai-nilai tersebut membawa akibat warga negara memiliki kewajiban moral untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan negara guna pengembangan pemerintahan demokratis; bersikap proaktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan demi pengembangan budaya demokrasi.

5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima terkait dengan upaya mewujudkan tujuan bersama hidup bernegara. Nilai-nilai itu antara lain: keadilan sosial, kesejahteraan sosial, pemerataan, jaminan sosial. Bagi warga negara, nilai-nilai tersebut membawa akibat sebagai warga negara memiliki kewajiban moral untuk berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, mewujudkan jaminan sosial dan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin.

V. SIMPULAN

Indonesia sebagai negara majemuk baik dalam segi: agama, suku bangsa, budaya, etnik, dan kewilayahan, maka diperlukan konsep pendidikan

multikultural sehingga menjadi pegangan untuk memperkuat identitas nasional. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Agama dan Sejarah yang telah diajarkan di SD hingga Perguruan Tinggi perlu disempurnakan dalam pengemasannya untuk memasukan pendidikan multikultural, seperti budaya lokal antar daerah, agar generasi muda bangga sebagai bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Hal itu dipandang perlu, agar siswa/ mahasiswa memiliki persepsi dan sikap multikulturalistik, dapat hidup berdampingan dalam keberagaman watak kultur, agama dan bahasa, menghormati hak setiap warga negara tanpa membedakan etnik mayoritas atau minoritas, dan dapat bersama membangun kekuatan bangsa sehingga diperhitungkan dalam percaturan global yang kuat.

Pendidikan multikultural sebagai wacana baru di Indonesia, namun urgensi implementasinya sangat tinggi. Melihat fenomena dan fakta yang begitu kompleks, sehingga penerapannya tidak hanya melalui pendidikan formal, namun juga pendidikan informal dan pendidikan non-formal yang dapat diimplementasikan kedalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga. Dalam pendidikan formal, pendidikan multikultur dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan melalui kurikulum mulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi. Implementasi pendidikan multikultural dapat dilakukan melalui kurikulum tiap jenjang pendidikan, program-program kesiswaan maupun dalam pembiasaan pada proses pembelajaran sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Penyisipan pendidikan multikultur dapat dilakukan dalam penanaman nilai-nilai multikultur ke dalam kurikulum ataupun kegiatan pembelajaran yang *responsive* multikultur dengan mengedepankan penghormatan terhadap perbedaan ras, suku, budaya, agama, dan kewilayahan antar anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, A. James. 1993. *Multicultural Education: Historical, Development, Dimension, and Practice*. Review of Research in Education.
- Creswell W. John. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Third Edition. California: Thousand Oaks.
- Drajat, Hari Untoro, dkk. 2011. *Multikulturalisme dan Integrasi Bangsa: Memperkuat Karakter*

- Masyarakat Multikultural*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Hasan, Hamid. 2000. *Multikulturalisme untuk Penyempurnaan Kurikulum Nasional*, Jakarta: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kuper, Adam dan Kuper, Jessica. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Naim, Ngainun dan Sauqi, Achmad. 2011. *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Parekh. 2012. *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Slamet. 2016. Penerapan Nilai-nilai Multikultural dalam Institusi Pendidikan. *Majalah Pawiyatan*, Vol: XXIII, No. 1, Mei 2016.
- Slamet. dkk, 2017. The Implementation of Multicultural Values in The Education Institution. *Journal of Education Development*, Vol: 5, No. 1, 2017.
- Slamet. 2017. *Pengembangan Model Manajemen Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar Berbasis Nilai-nilai Multikultural bagi Guru Sejarah SMA*, Disertasi. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Tidak dipublikasikan.
- Suparlan, Parsudi. 2002. *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, dalam Makalah yang diseminarkan pada Simposium Internasional ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Bali-Denpasar, 16-21 Juli.
- Sunarto, Kamanto. dkk (Editor). 2004. *Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia: Stepping Into the Unfamiliar*. Jakarta: FISIP-Universitas Indonesia.
- Supardan, Dadang. 2005. *Pembelajaran Sejarah Berbasis Pendekatan Multikultural dan Perspektif Sejarah Lokal, Nasional, dan Global dalam Integrasi Bangsa*, Disertasi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Tidak dipublikasikan.
- Stavenhagen, Rudolfo. 1996, *Education for a Multikultural World*, in Jasque Delors (et all), *Learning: the treasure within*, Paris, UNESCO.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta: Grasindo.